

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan Peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Yogyakarta-Solo di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, telah menyelesaikan tahap Perencanaan dan Persiapan (sesuai SK Penetapan Lokasi) dan saat ini berada dalam Tahap Pelaksanaan pada kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi (Invent-Indent). Pengadaan tanah dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, yang seluruhnya bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pembangunan negara dan perlindungan hak-hak masyarakat yang tanahnya terdampak. Dalam setiap tahapan tersebut, prinsip keadilan, keterbukaan, kesepakatan, dan kepastian hukum menjadi landasan utama agar proses pengadaan tanah berjalan secara layak dan adil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, Penulis memberikan saran yang terkait, yaitu:

1. Dalam Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, Penilai Publik harus memberikan laporan ringkas yang mudah dipahami oleh masyarakat. Laporan ini harus merinci secara eksplisit dan terbuka komponen perhitungan untuk nilai tanah, bangunan, tanaman, dan yang terpenting,

komponen kerugian non-fisik (kerugian usaha dan biaya pindah). Transparansi ini akan membangun kepercayaan dan meminimalisir sanggahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Muhsin, Laila Nafisah, & Yuni Siswanti. (2019). *Surat Kekacangan Tanah Sultan Ground*
- Arba. (2021). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Perkasa).
- Isnaini, Anggreni.(2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Medan, Pustaka Prima.
- Lestari, P. (2020). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*
- Munsyarief. (2013). *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penerbit Ombak CV, 2013
- Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. (2022) *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*.
- Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana
- Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum. (2017). *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Urip Santoso, 2016, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

Jurnal:

- Deo Enggartiasto, Setiowati, Rochmat Martanto. (2021). *Problematika dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta International Airport*. Jurnal Tunas Agraria Vol. 4 No.1
- Parakleyto Majma Al-Bahrayn, Lego Karjoko, Rahayu Subekti. (2025). *Penyelesaian Tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang dikuasai Masyarakat Berdasarkan Asas Kerakyatan*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
- Pitasari, P, Guntur, I. G. N. And Kistiyah, S. (2020) “*Problematika Penyelesaian Pelepasan Tanah Wakaf, Tanah Desa, Dan Tanah Instansi Pemerintah Untuk Bandara Baru Di Yogyakarta*”
- Umar, J. (2021) “*Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta*”
- Utomo, S. (2020) “*Problematika Proses Pengadaan Tanah*”

Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., & Sutarni, N. (2021). *“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo Di Kabupaten Boyolali” (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Yogyakarta-Solo).*

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Paraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Skripsi:

Adenia, A. (2022). Mekanisme, Permasalahan, dan Dampak Pengadaan Tanah pada Tanah Desa untuk Kepentingan Umum Pembangunan Tol Jogja-Bawen di Yogyakarta. Tesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Ekasetya. Mohammad Paurindra. (2015). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes).

Lampiran

Dokumentasi Penelitian Wawancara dengan Bapak Samsul bahri selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah BPN DIY



Dokumentasi Penelitian Wawancara dengan Responden Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Jogja-Klaten: Kusuma Indrana Dewi dan Ruskam Jaya

